BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer.

4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di wilayah Kota Bandung. Maka pada sub bab ini akan menjelaskan sejarah pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama *"Cope Napoleon"*. Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan *"Oor Logs-Overgangs Blasting"* (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang. Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "Deinspetie van Vinancian", yang kemudian diganti dengan nama "Zeinenbu" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke

Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

a. Kelompok Coorporative, yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.
b. Kelompok Non-Coorporative, yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" *(Groofpostweg*), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Pada tanggal 17 Desember 1975 Inspeksi Keuangan Belanda dengan keputusan Menteri Keuangan diganti menjadi Inspeksi Pajak Bandung. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.01/1979tanggal 6 April 1979 Inspeksi Pajak Bandung mulai 1 Januari 1980 dipecah menjadi 2 yaitu:

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang beralamatkan di Jalan Asia Afrika nomor 114 Bandung.

2. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang beralamatkan di Jalan Purnawarman nomor 21 yang kemudian pada tanggal 1 Januari 1981 pindah menempati gedung baru yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta sampai saat ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Dalam perkembangan pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni :

1) Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2) KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3) KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116

4) KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574
5) KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
6) KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78

Namun Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP.112/PJ/ 2007, tentang penerapan organisasi, tata cara dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi di lingkungn Kantor Wilayah Direktorat Janderal Pajak Banten, Kanwil Jawa Barat I dan II tanggal 28 Agustus 2007, terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2007, Kantor Pelayanan Pajak di Bandung di bagi menjadi:

1. KPP Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung.
2. KPP Bandung Karees di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.
3. KPP Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.
4. KPP Bandung Bojonagara di Jalan Cipaganti No. 157 Bandung.
5. KPP Bandung Cicadas di Jalan Soekarno-Hatta No. 781 Bandung.

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wilayah Kota Bandung yaitu:

1. Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi

A. Politik, Mendukung Demokrasi Bangsa

b. Kelembagaan, Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.
c. Fiskal, Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi.
d. Ekonomi, Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang minimizing distortion.

Berikut adalah Sejarah singkat 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di wilayah kota bandung:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (*Groofpostweg*), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Pada tanggal 17 Desember 1975 Inspeksi Keuangan Belanda dengan keputusan Menteri Keuangan diganti menjadi Inspeksi Pajak Bandung. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.01/1979tanggal

6 April 1979 Inspeksi Pajak Bandung mulai 1 Januari 1980 dipecah menjadi 2 yaitu:

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang beralamatkan di Jalan Asia Afrika nomor 114 Bandung.
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang beralamatkan di Jalan Purnawarman nomor 21 yang kemudian pada tanggal 1 Januari 1981 pindah menempati gedung baru yang beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta sampai saat ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni:

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada

bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni:

1. Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114.
2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372.
3. KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116.
4. KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574.
5. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21.
6. KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara

Sebenarnya kelima KPP Pratama yang berada di wilayah kota bandung mempunyai sejarah yang hampir sama kurang lebih, hanya terdapat sedikit perbedaan saja. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terjadi reorganisasi pada Dirjen Pajak, semula Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Kotamadya dan Kabupaten Bandung yang terdiri dari empat Kantor Pelayanan Pajak antara lain tiga Kantor Pelayanan Pajak di Kodya Bandung yaitu:

1. KPP Bandung Barat di Jalan Soekarno-Hatta No.216 Bandung.
2. KPP Bandung Timur di Jalan Kiaracondong No.372 Bandung.
3. KPP Bandung Tengah di Jalan Purnawarman No.21 Bandung.
4. KPP Bandung Cimahi di Cimahi.

Kemudian dipecah lagi menjadi lima KPP, yaitu:

1. KPP Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No.216 Bandung.
2. KPP Bandung Karees di Jalan Kiaracondong No.372 Bandung.

3. KPP Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No.21 Bandung.

4. KPP Bandung Bojonagara di Jalan Cipaganti No.155-157 Bandung.

5. KPP Cimahi di Cimahi.

Selanjutnya pada akhir tahun 2007, sehubungan dengan adanya peleburan KP. PBB, KARIKPA, dan KPP menjadi KPP Pratama dan KPP Madya maka KPP Bandung Bojonagara dirubah menjadi KPP Pratama Bandung Bojonagara sebagai KPP hasil peleburan bagian KP.PBB Bandung Satu, Karikpa dan KPP Bandung Bojonagara.

3. Kantor Pelayanan Pajak PratamaTegallega

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP.112/PJ/ 2007, tentang penerapan organisasi, tata cara dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi di lingkungn Kantor Wilayah Direktorat Janderal Pajak Banten, Kanwil Jawa Barat I dan II tanggal 28 Agustus 2007, terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2007, Kantor Pelayanan Pajak di Bandung di bagi menjadi:

1. KPP Bandung Tegallega di Jalan Soekarno-Hatta No. 216 Bandung.

2. KPP Bandung Karees di Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung.

3. KPP Bandung Cibeunying di Jalan Purnawarman No. 21 Bandung.

4. KPP Bandung Bojonagara di Jalan Cipaganti No. 157 Bandung.

5. KPP Bandung Cicadas di Jalan Soekarno-Hatta No. 781 Bandung.

Adapun wilayah kerja untuk Kantor Pelayanan Pajak Tegallega Bandung meliputi:

1. Kecamatan Bandung Kulon.
2. Kecamatan Astana Anyar.
3. Kecamatan Babakan Ciparay.
4. Kecamatan Bojong Kaler.
5. Kecamatan Bojongloa Timur.

4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1989 Nomor Kep-276/KMK/1989, terhitung tanggal 1 April 1989 seluruh Kantor Inspeksi Pajak di Indonesia diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak dan di Bandung sendiri terdapat 4 KPP yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur yang beralamat di Jalan Kiaracondong No.327 Bandung.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah yang beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No.118 Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi yang beralamat di Jalan Raya Barat No.1 Cimahi.

Pada tanggal 20 Maret 1994 dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK/01/1994 terjadi lagi reorganisasi sehingga KPP yang ada di Bandung dipecah menjadi:

1. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi meliputi: Kota Administratif Cimahi dan Kabupaten Bandung yang berkantor di Jalan Raya Barat Cimahi.

2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegalllega meliputi: daerah pemerintahan (Daerah Kawedanan Tegallega) yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying meliputi: daerah pemerintahan Cibeunying yang berkantor di Jalan Purnawarman No.21 Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees meliputi: daerah pemerintahan Kerees yang berkantor di Jalan Kiaracondong 372 Bandung.
5. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonegara meliputi: daerah Bojonegara yang berkantor sementara di Jalan Cipaganti No.157 Bandung.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees yang berada dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak VII Bandung meliputi: Wilayah Kiaracondong.

1. Kecamatan Lengkong
2. Kecamatan Regol
3. Kecamatan Batununggal
4. Kecamatan Margacinta
5. Kecamatan Rancasari
6. Kecamatan Bandung Kidul
7. Kecamatan Sumedang

5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001

tanggal 23 Juli 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. KMK tersebut memutuskan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying yang semula wilayahnya meliputi wilayah Cibeunying dan wilayah Ujungberung dipecah menjadi dua Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying sebagai Kantor Pelayanan Pajak lama meliputi wilayah Cibeunying, dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas sebagai Kantor Pelayanan Pajak baru meliputi wilayah Ujungberung ditambah wilayah kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

Kemudian berdasarkan KEP-122/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II sejak tanggal 28 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas mulai menerapkan sistem administrasi modern dan berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 55/PMK.01/2007 wilayah kerja Kantor pelayanan Pajak Bandung Cicadas meliputi 6 (enam) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Cicadas
2. Kecamatan Arcamanik
3. Kecamatan Cibiru
4. Kecamatan Ujungberung
5. Kecamatan Rancasari
6. Kecamatan Margacinta

Kedudukan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas adalah sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak. Keberadaan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Secara organisatoris, KPP Bandung Cicadas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dibantu oleh Kepala Seksi, *Account Representatve*, Fungsional Pemeriksa, Fungsional Penilai PBB dan para Staff Pelaksana.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung

Struktur organisasi sangatlah penting karena dengan adanya struktur organisasi dapat mempermudah pembagian tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Adapun susunan organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

132/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ/2007 tanggal 09 Agustus 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Operasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, saat mulai operasional Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung secara resmi adalah tanggal 28 Agustus 2007 dengan menjalankan pekerjaan berdasarkan stuktur organisasi dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
2. Sub Bagian Umum;
3. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
5. Seksi Pelayanan;
6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
7. Seksi Pemeriksaan;
8. Seksi Penagihan;
9. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari:

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
b. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
c. Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.3 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan salah satu badan pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak yang berada di bawah wewenang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung mengklasifikasikan fungsi dan tugasnya sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

   Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama bertugas untuk memberikan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan dalam pemeriksaan dan penagihan.

2. Sub Bagian Umum

   Sub Bagian Umum memiliki fungsi dan tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, tata usaha, dan perlengkapan.

3. Seksi Ekstentifikasi Perpajakan

Seksi Ekstentifikasi Perpajakan mempunyai fungsi dan tugas melaksankan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi pajak, pendataan subjek dan objek pajak, penilaian objek, dan kegiatan ekstentifikasi perpajakan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi dan tugas untuk mengumpulakn dan mengolah data, menyajikan informasi perpajakan, merekam dokumentasi perpajakan, mengurus tata usaha penerimaan pajak, pengalokasian dan penatausahan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayana dukungan teknus computer, memantau aplikasi *e-SPT* dan *e-Filling*, serta menyiapkan laporan kerja.

5. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penetapan dan penerbitan hukum pajak, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya, memberikan penyuluhan pajak, dan pelaksanaan registrasi wajib pajak.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi memiliki fungsi dan tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan wajib pajak, memberikan bimbingan dan himbauan pada wajib pajak konsulatsi teknis perpajakan kepada wajib pajak, menyusun profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsilisasi data

wajib pajak dalam rangka intentifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding.

7. Seksi Pemeriksaan

   Seksi Pemeriksaan mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan untuk menyusun rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran SP3, dan administrasi pemeriksaan lainnya.

8. Seksi Penagihan

   Seksi Penagihan memiliki fungsi dan tugas melaksanakan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

   Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi dan tugas untuk melaksanakan koordinasi dengan seksi pemeriksaan pejabat fungsional, penilai, dan berkoordinasi dengan seksi ekstentifikasi.

4.1.4 Aktivitas Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
d. Penyuluhan perpajakan;
e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak;
f. Pelaksanaan ekstensifikasi;
g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
k. Pelaksanaan intensifikasi;
l. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

4.2 Karakteristik Responden

Data responden dikumpulkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebanyak 40 responden. Untuk variabel X, Y dan Z kuesioner diberikan kepada

responden yaitu petugas seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI). Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase %
Laki-laki	28	70%
Perempuan	12	30%
Jumlah	40	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki berjumlah 28 orang atau sebesar 70% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 12 orang atau sebesar 30%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki. Hal ini Karena Jumlah pegawai seksi PDI yang ada di KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jabar mayoritas adalah pegawai laki-laki yang memiliki kecepatan kerja lebih dibandingkan Perempuan, karena beban kerja seksi PDI ini cukup banyak dan berat.

2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
20-25 Tahun	6	15.00%
26-30 Tahun	11	27.50%
31-35 Tahun	3	7.50%
36-40 Tahun	6	15.00%
>40 Tahun	14	35.00%
Jumlah	40	100 %

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 20 sampai 25 tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 15%, 26 sampai 30 tahun berjumlah 11 orang atau sebesar 27,5%, 31 sampai 35 tahun berjumlah 3 orang atau sebesar 7,5%, 36 sampai 40 tahun berjumlah 6 orang atau sebesar 15% dan usia lebih dari 40 tahun berjumlah 14 orang atau sebesar 35%. Jadi dari data di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia lebih dari 40 tahun. Hal ini disebabkan karena Pada seksi PDI ini diperlukan Pegawai yang berpengalaman agar memperkecil adanya kesalahan dalam pengolahan data.

3. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SMA atau sederajat	10	25.00%
Diploma I,II	2	5.00%
Diploma III	11	27.50%
Strata I (S1)	13	32.50%
Strata II (S2)	3	7.50%
Lain-lain	1	2.50%
Jumlah	40	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat sebanyak 10 orang atau sebesar 25%, Diploma I,II sebanyak 2 orang atau sebesar 5%, Diploma III (D3) sebanyak 11 orang atau sebesar 27,5% dan responden dengan pendidikan terakhir Strata I (S1) sebanyak 13 orang atau sebesar 32,5% sedangkan responden dengan pendidikan terakhir Strata II (S2) sebanyak 3 orang atau sebesar 7.5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata I (S1). Hal ini disebabkan Pada seksi PDI ini diperlukan pegawai yang lebih memahami akan Sistem Informasi, selain itu diharapkan dapat di andalkan bukan hanya dalam kecepatan tapi juga ketepatan.

4. Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
0 s/d 1 Tahun	1	2.50%
1– 3 Tahun	2	5.00%
3 – 5 Tahun	5	12.50%
>5 Tahun	32	80.00%
Jumlah	40	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang bekerja dibawah 1 tahun sebanyak 1 orang atau sebesar 2,5%, responden dengan lama kerja 1–3 tahun sebanyak 2 orang atau sebesar 5%, responden dengan lama kerja 3–5 tahun sebanyak 5 orang atau sebesar 12,5%, dan responden dengan

lama kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 32 orang atau sebesar 80%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini dengan lama kerja paling banyak lebih dari 5 tahun. Hal ini disebabkan Pada seksi PDI diperlukan pegawai yang berpengalaman dan memahami tentang pajak. Untuk Memperkecil adanya kesalahan yang mungkin terjadi.

4.3 Hasil Pembahasan

4.3.1 Analisis Kualitatif (Metode Deskriptif)

4.3.1.1 Partisipasi Pengguna Sistem Informasi Akuntansi Direktorat Jenderal Pajak di KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat

Partisipasi Pengguna Sistem Informasi Akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung diukur menggunakan 5 indikator dan dioperasionalisasikan menggunakan 7 butir pernyataan, setiap butir pernyataan disertai dengan 5 pilihan jawaban yang terdiri dari kuesioner negatif yang diberi bobot 1 sampai 5. Berikut ini diuraikan gambaran jawaban responden mengenai Partisipasi Pengguna Sistem Informasi Akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung berdasarkan indikator.

1. **Pengetahuan akan Kondisi Lokal**

   Untuk mendapatkan gambaran tentang pengetahuan akan kondisi lokal secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Tanggapan Responden tentang Pengetahuan akan Kondisi Lokal

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jml	Total Skor	Skor Ideal
1	Cara penggunaan SIKKA/MPN	17	14	7	2	0	40	166	200
		42.5	35.0	17.5	5.0	0.0	100.0	83.0	

2	Susunan menu pada SIKKA/MPN	6	17	16	1	0	40	148	200
		15.0	42.5	40.0	2.5	0.0	100.0	74.0	
3	Partisipasi anda dalam memberikan masukan kepada perancang dalam pengembangan SIKKA/MPN	0	1	7	0	32	40	57	200
		0.0	2.5	17.5	0.0	80.0	100.0	28.5	
Jumlah Skor Total								371	
Persentase								61.83	

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Pengetahuan akan Kondisi Lokal. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total Pengetahuan akan Kondisi Lokal adalah 371. Lalu pengukurannya ditentukan dengan cara:

Skor ideal = 5 x 3 x 40 = 600

Persentase Skor = [(skor aktual) : nilai ideal] x 100%

= (371 : 600) x 100%

= 61,83%

Dari hasil perhitungan di atas menunjukan secara keseluruhan indikator Pengetahuan akan Kondisi Lokal yang terdiri dari 3 pernyataan, diperoleh persentase sebesar 61,83%, ini artinya Pengetahuan akan Kondisi Lokal berada dalam skala kategori cukup. Namun apabila dikaji dari setiap pertanyaan sebenarnya pada dua pertanyaan awal tentang "Cara penggunaan SIKKA/MPN:" dan "Susunan menu pada SIKKA/MPN " tanggapan responden terhadap kedua pertanyaan itu baik denganpersentase masing-masing 83% dan 74%. Namun pada pertanyaan ketiga tentang "Partisipasi anda dalam memberikan masukan kepada perancang dalam pengembangan SIKKA/MPN" bisa dikatakan sangatlah rendah yaitu hanya sebesar 28,5%. Ini dapat diartikan bahwa sebenarnya Pengguna tidak terlibat langsung atau tidak dilibatkan

secara langsung padahal, seperti yang ada pada Bab2 bahwa pengguna sistem itulah yang mengetahui kondisi lokal lebih baik dari siapapun karena nantinya dia lah yang akan menggunakan Sistem Informasi yang telah ada tersebut.

2. Keengganan untuk berubah

Untuk mendapatkan gambaran tentang indikator keengganan untuk berubah secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Tanggapan Responden tentang Keengganan untuk berubah

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jml	Total Skor	Skor Ideal
4	Adanya SIKKA/MPN	8	23	9	0	0	40	159	200
		20.0	57.5	22.5	0.0	0.0	100.0	79.5	
Jumlah Skor Total								159	
Persentase								79.50	

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Keengganan untuk berubah. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total Keengganan untuk berubah adalah 159. Jumlah skor tersebut kemudian pengukurannya ditentukan dengan cara:

Skor ideal = 5 x 1 x 40 = 200

Persentase Skor = [(skor aktual) : skor ideal] x 100%

= (159 : 200) x 100%

= 79,50%

Dari hasil perhitungan di atas menunjukan secara keseluruhan indikator Keengganan untuk berubah yang terdiri dari 1 pernyataan, diperoleh hasil akhir persentase skor tanggapan responden sebesar 79,50% maka untuk indikator keengganan untuk Berubah berada pada kategori baik namun belum mencapai

kategori sangat baik. Jadi, itu berarti dalam pelaksanaannya masih ada beberapa pengguna yang enggan untuk berubah.

3. Kebutuhan Pengguna

Untuk mendapatkan gambaran tentang indikator Kebutuhan pengguna secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Tanggapan Responden tentang Kebutuhan Pengguna

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jml	Total Skor	Skor Ideal
5	Sistem Informasi (SIKKA/MPN) yang dibuat	5	16	19	0	0	40	146	200
		12.5	40.0	47.5	0.0	0.0	100.0	73.0	
Jumlah Skor Total								146	
Persentase								73.00	

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Kebutuhan Pengguna. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total Kebutuhan Pengguna adalah 146. Jumlah skor tersebut kemudian pengukurannya ditentukan dengan cara:

Skor ideal = 5 x 1 x 40 = 200

Persentase Skor = [(skor aktual) : Skor ideal] x 100%

= (146 : 200) x 100%

= 73,00%

Dari Hasil perhitungan di atas menunjukan secara keseluruhan indikator Kebutuhan Pengguna yang terdiri dari 1 pernyataan, berada dalam skala kategori baik. Dengan hasil persentase skor tanggapan responden sebesar 73,00% maka untuk indikator kebutuhan pengguna berada pada kategori baik namun demikian, persentase baiknya masih cukup rendah dan belum mencapai

kategori sangat baik. Jadi, itu berarti dalam pelaksanaannya masih ada beberapa pengguna yang kurang berpartisipasi dan merasa bahwa sistem informasi yang dibuat belum sesuai dengan kebutuhan si pengguna.

4. User merasa terancam

Untuk mendapatkan gambaran tentang indikator User merasa terancam secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Tanggapan Responden tentang User merasa terancam

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jml	Total Skor	Skor Ideal
6	Dengan diterapkan SIKKA/MPN anda merasa Pekerjaan Menjadi	4	25	11	0	0	40	153	200
		10.0	62.5	27.5	0.0	0.0	100.0	76.5	
Jumlah Skor Total								153	
Persentase								76.50	

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai User merasa terancam. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total User merasa terancam adalah 153. Jumlah skor tersebut kemudian pengukurannya ditentukan dengan cara:

Skor ideal = 5 x 1 x 40 = 200

Persentase Skor = [(skor aktual) : Skor ideal] x 100%

= (153 : 200) x 100%

= 76,50%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukan secara keseluruhan Indikator *User* merasa terancam yang terdiri dari 1 pernyataan, berada dalam skala kategori baik. Hasil persentase skor tanggapan responden sebesar 76,50% indikator *User* merasa terancam berada pada kategori baik namun, masih

belum mencapai kategori sangat baik. Jadi, itu berarti dalam pelaksanaannya masih ada beberapa pengguna yang merasa bahwa sistem informasi yang dibuat belum sesuai dengan standar keamanan yang berlaku dan kurang *User Friendly*.

5. Meningkatkan alam demokrasi

Untuk mendapatkan gambaran tentang indikator meningkatkan alam demokrasi secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Tanggapan Responden tentang Meningkatkan alam demokrasi

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jml	Total Skor	Skor Ideal
7	SIKKA/MPN melibatkan anda dalam pengambilan keputusan	10	12	9	4	5	40	138	200
		25.0	30.0	22.5	10.0	12.5	100.0	69.0	
Jumlah Skor Total								138	
Persentase								69.00	

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Meningkatkan alam demokrasi. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total Meningkatkan alam demokrasi adalah 138. Jumlah skor tersebut kemudian pengukurannya ditentukan dengan cara:

Skor ideal = 5 x 1 x 40 = 200

Persentase Skor = [(skor aktual) : Skor ideal] x 100%

= (138 : 200) x 100%

= 69,00%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukan secara keseluruhan indikator Meningkatkan alam demokrasi yang terdiri dari 1 pernyataan, berada

dalam skala kategori baik. Dengan hasil persentase skor tanggapan responden sebesar 69,00% maka untuk indikator Meningkatkan alam demokrasi berada pada kategori baik namun demikian, persentase baiknya masih sangat rendah dan tidak mencapai kategori sangat baik. Jadi, itu berarti dalam pelaksanaannya masih ada beberapa pengguna yang kuarng berpartisipasi dan merasa bahwa setelah diberlakukan nya sistem informasi Akuntansi atau dalam hal ini (SIKKA/MPN) tidak terlalu berpengaruh terhadap demokrasi, krena tidak semua pegawai bisa mengakses sistem tersebut hanya beberapa pegawai yang berkepentingan saja yang bisa mengaksesnya.

- **Variabel X Partisipasi Pengguna**

Dari seluruh urayan penjelasan tiap inikator yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan secara keseluruhan untuk variabel Partisipasi Pengguna Sistem Informasi Akuntansi sebagai berikut:

Tabel 4.10
Variabel X Partisipasi Pengguna

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	kategori	Total Skor	Skor Ideal
1	Cara penggunaan SIKKA/MPN	17	14	7	2	0	Baik	166	200
		42.5	35.0	17.5	5.0	0.0		83.0	
2	Susunan menu pada SIKKA/MPN	6	17	16	1	0	Baik	148	200
		15.0	42.5	40.0	2.5	0.0		74.0	
3	Partisipasi anda dalam memberikan masukan kepada perancang dalam pengembangan SIKKA/MPN	0	1	7	0	32	Kurang Baik	57	200
		0.0	2.5	17.5	0.0	80.0		28.5	
4	Adanya SIKKA/MPN	8	23	9	0	0	Baik	159	200
		20.0	57.5	22.5	0.0	0.0		79.5	
5	Sistem Informasi (SIKKA/MPN) yang dibuat	5	16	19	0	0	Baik	146	200
		12.5	40.0	47.5	0.0	0.0		73.0	
6	Dengan diterapkan SIKKA/MPN anda merasa Pekerjaan Menjadi	4	25	11	0	0	Baik	153	200
		10.0	62.5	27.5	0.0	0.0		76.5	
7	SIKKA/MPN melibatkan anda dalam pengambilan keputusan	10	12	9	4	5	Baik	138	200
		25.0	30.0	22.5	10.0	12.5		69.0	
Jumlah Skor Total							Baik	967	
Persentase								69.07	

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Variabel X Partisipasi Pengguna. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total Variabel X Partisipasi Pengguna adalah 967. Jumlah skor tersebut kemudian pengukurannya ditentukan dengan cara:

Skor ideal = 5 x 7 x 40 = 1400

Persentase Skor = [(skor aktual) : Skor ideal] x 100%

= (967 : 1400) x 100%

= 69,07%

Dari hasil perhitungan di atas menunjukan dari seluruh Variabel X Partisipasi Pengguna yang terdiri dari 7 pernyataan, didapatkan hasil persentase sebesar 69,07% ini artinya Variabel X Partisipasi Pengguna berada dalam skala kategori baik. namun walaupun sudah mencapai kategori baik skornya masih sangat rendah bahkan hamper mencapai kategori cukup. Ini mengindikasikan bahwa masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya seperti yang telah penulis paparkan diatas.

4.3.1.2 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah kanwil Jabar I diukur menggunakan 6 dimensi yang memiliki 16 indikator dan dioperasionalisasikan menggunakan 18 butir pernyataan, setiap butir pernyataan disertai dengan 5 pilihan jawaban yang terdiri dari kuesioner negatif yang diberi bobot 1 sampai 5. Berikut ini diuraikan gambaran jawaban responden mengenai Sistem Informasi Akuntansi

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah kanwil Jabar I berdasarkan dimensi.

1. Jaringan komunikasi

Untuk mendapatkan gambaran tentang dimensi dan indikator Jaringan komunikasi secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Tanggapan Responden tentang Jaringan komunikasi

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jml	Total Skor	Skor Ideal
8	Jaringan LAN yang terhubung antar seksi di kantor pelayanan pajak anda	3	25	6	4	2	40	143	200
		7.5	62.5	15.0	10.0	5.0	100.0	71.5	
9	Mengakses SIKKA/MPN	9	20	5	1	5	40	147	200
		22.5	50.0	12.5	2.5	12.5	100.0	73.5	
10	SIKKA/MPN terintegrasi seluruh Indonesia	3	20	17	0	0	40	146	200
		7.5	50.0	42.5	0.0	0.0	100.0	73.0	
11	SIKKA/MPN terhubung secara online dengan bank dan tidak ada masalah dalam jaringannya	8	5	23	2	2	40	135	200
		20.0	12.5	57.5	5.0	5.0	100.0	67.5	
Jumlah Skor Total								571	
Persentase								71.38	

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Jaringan komunikasi. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total Jaringan komunikasi adalah 571. Jumlah skor tersebut kemudian pengukurannya ditentukan dengan cara:

Skor ideal = 5 x 4 x 40 = 800

Persentase Skor = [(skor aktual) : Skor ideal] x 100%

= (571 : 800) x 100%

= 71,38%

Dari hasil perhitungan di atas menunjukan Jaringan komunikasi yang terdiri dari 4 pernyataan, berada dalam skala kategori baik. Dengan hasil persentase skor tanggapan responden sebesar 71,38% maka Jaringan komunikasi berada pada kategori baik namun demikian, persentase baiknya masih sangat rendah dan tidak mencapai kategori sangat baik. Namun apabila dikaji dari setiap pertanyaan pada pertanyaan 8 sampai dengan pertanyaan 10 seperti berikut "Jaringan LAN yang terhubung antar seksi di kantor pelayanan pajak anda:", "Mengakses SIKKA/MPN:" dan "SIKKA/MPN terintegrasi seluruh Indonesia" mempunyai persentase tanggapan responden baik masing-masing sebesar 71.5%, 73.5% dan 73.0% namun skor baik tersebut masih cukup rendah dan masih jauh dari kategori sangat tinggi. Sedangkan pertanyaan nomor 11 yang berbunyi "SIKKA/MPN terhubung secara online dengan bank dan tidak ada masalah dalam jaringannya" memiliki tanggapan responden sebesar 67,5% berada pada level cukup. Ini berarti walaupun secara keseluruhan jaringan komunikasi berada pada kategori baik namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah terutama masalah integrasi pencatatan online dengan bank.

2. Database

Untuk mendapatkan gambaran tentang dimensi dan indikator *Database* secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Tanggapan Responden tentang *Database*

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jml	Total Skor	Skor Ideal
12	Sistem *Database* dalam SIKKA/MPN	0	30	1	9	0	40	141	200
		0.0	75.0	2.5	22.5	0.0	100.0	70.5	
13	Pengolahan data dalam SIKKA/MPN untuk menghasilkan informasi dilakukan dengan cara	8	10	9	6	7	40	126	200
		20.0	25.0	22.5	15.0	17.5	100.0	63.0	
14	Sistem *Database* dalam SIKKA/MPN	8	3	18	7	4	40	124	200
		20.0	7.5	45.0	17.5	10.0	100.0	62.0	
15	Sistem *Database* dalam SIKKA/MPN	2	6	25	5	2	40	121	200
		5.0	15.0	62.5	12.5	5.0	100.0	60.5	
Jumlah Skor Total								512	
Persentase								64.00	

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai *Database*. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total *Database* adalah 512. Jumlah skor tersebut kemudian pengukurannya ditentukan dengan cara:

Skor ideal = 5 x 4 x 40 = 800

Persentase Skor = [(skor aktual) : Skor ideal] x 100%

= (512 : 800) x 100%

= 64,00%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukan secara keseluruhan *Database* yang terdiri dari 4 pernyataan, berada dalam skala kategori cukup. Dengan hasil persentase skor tanggapan responden sebesar 64,00% maka *Database* yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah kanwil Jabar I dikategorikan cukup. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase masing-masing pertanyaan yang rata-rata berada pada level atau kategori cukup. Dari empat buah pertanyaan yang ada tercatat hanya satu yang memiliki

persentase baik yaitu pertanyaan 12 yang berbunyi "Sistem *Database* dalam SIKKA/MPN" yang memiliki persentase sebesar 70,5%. Sedangkan sisanya yaitu pertanyaan 13 sampai dengan 15 memiliki persentase yang berada pada level cukup masing-masing sebesar 63,0%, 62,0% dan 60,5%. Berdasarkan data tersebut berarti dapat dikatakan bahwa masih terdapat beberapa masalah dalam penerapan database yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah kanwil Jabar I.

3. Software

Untuk mendapatkan gambaran tentang dimensi dan indikator *Software* secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.13
Tanggapan Responden tentang *Software*

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jml	Total Skor	Skor Ideal
16	Sistem operasi (*software*) yang digunakan dalam SIKKA/MPN	11	0	4	4	21	40	96	200
		27.5	0.0	10.0	10.0	52.5	100.0	48.0	
17	Sistem operasi yang digunakan dalam SIKKA/MPN	13	2	9	10	6	40	126	200
		32.5	5.0	22.5	25.0	15.0	100.0	63.0	
Jumlah Skor Total								222	
Persentase								55.50	

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai *Software*. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total *Software* adalah 222. Jumlah skor tersebut kemudian pengukurannya ditentukan dengan cara:

Skor ideal = 5 x 2 x 40 = 400

Persentase Skor = [(skor aktual) : Skor ideal] x 100%

= (222 : 400) x 100%

= 55,50%

Berdasarkan pehitungan di atas menunjukan dimensi dan indikator *Software* yang terdiri dari 2 pernyataan, berada dalam skala kategori cukup. Dengan hasil persentase skor tanggapan responden sebesar 55,5% maka bisa dikatakan *Software* yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah kanwil Jabar I berada pada level cukup. Hal tersebut dapat dilihat dari kedua pertanyaan diatas tentang *software* yang memiliki persentase rendah. Pertanyaan 16 yang berbunyi "Sistem operasi (*software*) yang digunakan dalam SIKKA/MPN:" hanya memiliki persentase tanggapan responden sebesar 48,0% dan berada pada level atau kategori kurang baik, itu menunjukan bahwa seperti yang penulis kemukakan dalam fenomena yang ada pada bab 1 kalau Sistem informasi yang ada masih lemot atau lambat, kemungkinan salah satunya dipengaruhi oleh *software* sistem operasinya yang kurang baik. Sedangkan pertanyaan nomor 17 memiliki persentase tanggapan responden sebesar 63% dan berada pada level cukup. Dari kedua pertanyaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penerapan Sistem informasi akuntansi masih mengalami beberapa masalah khususnya masalah *software*.

4. Hardware

Untuk mendapatkan gambaran tentang dimensi dan indikator *Hardware* secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Tanggapan Responden tentang *Hardware*

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jml	Total Skor	Skor Ideal
18	Keyboard, mouse, scanner sebagai peralatan input data yang digunakan anda	6	15	19	0	0	40	147	200
		15.0	37.5	47.5	0.0	0.0	100.0	73.5	
19	Pengolahan data (CPU) yang digunakan anda	5	12	23	0	0	40	142	200
		12.5	30.0	57.5	0.0	0.0	100.0	71.0	
20	Peralatan Monitor, printer yang digunakan anda	4	14	22	0	0	40	142	200
		10.0	35.0	55.0	0.0	0.0	100.0	71.0	
21	Komunikasi seperti LAN, wireless, dll yang digunakan anda	7	10	23	0	0	40	144	200
		17.5	25.0	57.5	0.0	0.0	100.0	72.0	
Jumlah Skor Total								575	
Persentase								71.88	

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai *Hardware*. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total *Hardware* adalah 575. Jumlah skor tersebut kemudian pengukurannya ditentukan dengan cara:

Skor ideal = 5 x 4 x 40 = 800

Persentase Skor = [(skor aktual) : Skor ideal] x 100%

= (575 : 800) x 100%

= 71,88%

Dari perhitungan di atas menunjukan *Hardware* yang terdiri dari 4 pernyataan, berada dalam skala kategori baik. Dengan hasil persentase skor tanggapan responden sebesar 71,88% maka bisa dikatakan *Hardware* yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah kanwil Jabar I berada pada level atau kategori baik. Namun terlihat bahwa walaupun berada pada kategori baik *hardware* memiliki persentase baik yang bisa dibilang rendah dan belum berada pada level sangat baik. Ini mengindikasikan bahwa

dalam penerapannya masih ada peralatan *hardware* yang mungkin kurang baik, dan mengalami beberapa masalah.

5. Brainware

Untuk mendapatkan gambaran tentang dimensi dan indikator *Brainware* secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Tanggapan Responden tentang *Brainware*

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jml	Total Skor	Skor Ideal
22	Anda mengerti dan faham dalam mengoperasikan SIKKA/MPN	4	23	11	0	2	40	147	200
		10.0	57.5	27.5	0.0	5.0	100.0	73.5	
Jumlah Skor Total								147	
Persentase								73.50	

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai *Brainware*. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total *Brainware* adalah 147. Jumlah skor tersebut kemudian pengukurannya ditentukan dengan cara:

Skor ideal = 5 x 1 x 40 = 200

Persentase Skor = [(skor aktual) : Skor ideal] x 100%

= (147 : 200) x 100%

= 73,50%

Dari hasil perhitungan di atas menunjukan *Brainware* yang terdiri dari 1 pernyataan, berada dalam skala kategori baik. Dengan hasil persentase skor tanggapan responden sebesar 73,50% maka bisa dikatakan *Barainware* yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah kanwil Jabar I

berada pada level atau kategori baik. Namun persentase baik tersebut masih cukup rendah dan belum berada pada level sangat baik. Ini mengindikasikan bahwa dalam penerapannya masih ada beberapa pegawai atau pengguna yang kurang memahami tentang sistem informasi meskipun secara keseluruhan cukup banyak juga yang sudah mengerti. Namun seperti kita ketahui bahwa *Brainware* adalah salah satu komponen yang penting dalam keberhasilan penerapan Sistem informasi akuntansi, jadi secanggih apapun system yang dibuat atau dirancang kalau pengguna/*brainware* tidak dapat mengimbangi akan menjadi percuma saja.

6. Prosedur

Untuk mendapatkan gambaran tentang dimensi dan indikator Prosedur secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Tanggapan Responden tentang Prosedur

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jml	Total Skor	Skor Ideal
23	Prosedur yang telah di terapkan dalam SOP SIKKA/MPN sesuai dengan peraturan dan mudah untuk dijalankan	2	26	11	1	0	40	149	200
		5.0	65.0	27.5	2.5	0.0	100.0	74.5	
24	Aktivitas yang dilakukan dalam pengoperasian SIKKA/MPN sudah sesuai dengan SOP	2	31	6	1	0	40	154	200
		5.0	77.5	15.0	2.5	0.0	100.0	77.0	
25	Fungsi SIKKA/MPN sudah sesuai dengan fungsi yang ada dalam SOP dan Peraturan pajak yang berlaku	2	29	6	3	0	40	150	200
		5.0	72.5	15.0	7.5	0.0	100.0	75.0	
Jumlah Skor Total								453	
Persentase								75.50	

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Prosedur. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total Prosedur adalah 453. Jumlah skor tersebut kemudian pengukurannya ditentukan dengan cara:

Skor ideal = 5 x 3 x 40 = 600

Persentase Skor = [(skor aktual) : Skor ideal] x 100%

= (453: 600) x 100%

= 75,50%

Berdasarkan perhitungan yang ada di atas menunjukan Prosedur yang terdiri dari 3 pernyataan, berada dalam skala kategori baik. Dengan hasil persentase skor tanggapan responden sebesar 75,50% maka bisa dikatakan Prosedur yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah kanwil Jabar I berada pada level atau kategori baik. Namun terlihat bahwa walaupun berada pada kategori baik hardware memiliki persentase baik yang bisa dibilang tidak terlalu tinggi dan belum berada pada level sangat baik. Ini mengindikasikan bahwa dalam penerapannya masih ada prosedur yang kurang baik atau terlalu rumit dan juga masih ada beberapa aktivitas yang kurang sesai dengan prosedur dan fungsinya.

- **Variabel Y Sistem Informasi Akuntansi**

Dari seluruh urayan penjelasan tiap dimensi dan inikator yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan secara keseluruhan untuk variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17
Variabel Y Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Kategori	Total Skor	Skor Ideal
8	Jaringan LAN yang terhubung antar seksi di kantor pelayanan pajak anda	3	25	6	4	2	Baik	143	200
		7.5	62.5	15.0	10.0	5.0		71.5	
9	Mengakses SIKKA/MPN	9	20	5	1	5	Baik	147	200
		22.5	50.0	12.5	2.5	12.5		73.5	
10	SIKKA/MPN terintegrasi seluruh Indonesia	3	20	17	0	0	Baik	146	200
		7.5	50.0	42.5	0.0	0.0		73.0	
11	SIKKA/MPN terhubung secara online dengan	8	5	23	2	2	Cukup	135	200

	bank dan tidak ada masalah dalam jaringannya	20.0	12.5	57.5	5.0	5.0		67.5	
12	Sistem Data Base dalam SIKKA/MPN	0	30	1	9	0	Baik	141	200
		0.0	75.0	2.5	22.5	0.0		70.5	
13	Pengolahan data dalam SIKKA/MPN untuk menghasilkan informasi dilakukan dengan cara	8	10	9	6	7	Cukup	126	200
		20.0	25.0	22.5	15.0	17.5		63.0	
14	Sistem Data Base dalam SIKKA/MPN	8	3	18	7	4	Cukup	124	200
		20.0	7.5	45.0	17.5	10.0		62.0	
15	Sistem Data Base dalam SIKKA/MPN	2	6	25	5	2	Cukup	121	200
		5.0	15.0	62.5	12.5	5.0		60.5	
16	Sistem operasi (software) yang digunakan dalam SIKKA/MPN	11	0	4	4	21	Kurang Baik	96	200
		27.5	0.0	10.0	10.0	52.5		48.0	
17	Sistem operasi yang digunakan dalam SIKKA/MPN	13	2	9	10	6	Cukup	126	200
		32.5	5.0	22.5	25.0	15.0		63.0	
18	Keyboard, mouse, scanner sebagai peralatan input data yang digunakan anda	6	15	19	0	0	Baik	147	200
		15.0	37.5	47.5	0.0	0.0		73.5	
19	Pengolahan data (CPU) yang digunakan anda	5	12	23	0	0	Baik	142	200
		12.5	30.0	57.5	0.0	0.0		71.0	
20	Peralatan Monitor, printer yang digunakan anda	4	14	22	0	0	Baik	142	200
		10.0	35.0	55.0	0.0	0.0		71.0	
21	Komunikasi seperti LAN, wireless, dll yang digunakan anda	7	10	23	0	0	Baik	144	200
		17.5	25.0	57.5	0.0	0.0		72.0	
22	Anda mengerti dan faham dalam mengoperasikan SIKKA/MPN	4	23	11	0	2	Baik	147	200
		10.0	57.5	27.5	0.0	5.0		73.5	
23	Prosedur yang telah di terapkan dalam SOP SIKKA/MPN sesuai dengan peraturan dan mudah untuk dijalankan	2	26	11	1	0	Baik	149	200
		5.0	65.0	27.5	2.5	0.0		74.5	
24	Aktivitas yang dilakukan dalam pengoperasian SIKKA/MPN sudah sesuai dengan SOP	2	31	6	1	0	Baik	154	200
		5.0	77.5	15.0	2.5	0.0		77.0	
25	Fungsi SIKKA/MPN sudah sesuai dengan fungsi yang ada dalam SOP dan Peraturan pajak yang berlaku	2	29	6	3	0	Baik	150	200
		5.0	72.5	15.0	7.5	0.0		75.0	
Jumlah Skor Total							Baik	2480	
Persentase								68.89	

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Variabel Y Sistem Informasi Akuntansi. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total Variabel Y Sistem Informasi Akuntansi adalah 2480. Jumlah skor tersebut kemudian pengukurannya ditentukan dengan cara:

Skor ideal = 5 x 18 x 40 = 3600

Persentase Skor = [(skor aktual) : Skor ideal] x 100%

= (2480: 720) x 100%

= 68,89%

Dari perhitungan di atas menunjukan seluruh Variabel Y Penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang terdiri dari 18 pernyataan, berada dalam skala kategori baik. Dengan hasil persentase skor tanggapan responden sebesar 68,89% maka bisa dikatakan secara keseluruhan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah kanwil Jabar I berada pada level atau kategori baik. Namun persentase baik daripada variabel ini masih sangat rendah, ini mengindikasikan bahwa dalam penerapanya masih terdapat bebeeapa masalah seperti yang telah di uraikan diatas.

4.3.1.3 Kualitas Informasi

Kualitas Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung diukur menggunakan 4 indikator dan dioperasionalisasikan menggunakan 7 butir pernyataan, setiap butir pernyataan disertai dengan 5 pilihan jawaban yang terdiri dari kuesioner negatif yang diberi bobot 1 sampai 5. Berikut ini diuraikan gambaran jawaban responden mengenai Kualitas Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung berdasarkan indikator.

1. **Akurat**

   Untuk mendapatkan gambaran tentang indikator Akurat secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.18
Tanggapan Responden tentang Akurat

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jml	Total Skor	Skor Ideal
26	Informasi yang dihasilkan oleh SIKKA/MPN	2	30	0	8	0	40	146	200
		5.0	75.0	0.0	20.0	0.0	100.0	73.0	
27	Tingkat akurasi informasi yang dihasilkan oleh SIKKA/MPN	11	19	1	9	0	40	152	200
		27.5	47.5	2.5	22.5	0.0	100.0	76.0	
Jumlah Skor Total								298	
Persentase								74.50	

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Akurat. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total Akurat adalah 298. Jumlah skor tersebut kemudian pengukurannya ditentukan dengan cara:

Skor ideal = 5 x 2 x 40 = 400

Persentase Skor = [(skor aktual) : Skor ideal] x 100%

= (298 : 400) x 100%

= 74,50%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas menunjukan indikator Akurat yang terdiri dari 2 pernyataan, berada dalam skala kategori baik. Dengan hasil persentase skor tanggapan responden sebesar 74,50% maka bisa dikatakan keakuratan informasi yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah kanwil Jabar I berada pada level atau kategori baik. Namun persentase baik daripada indikator ini masih sangat rendah, ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaannya masih ada beberapa responden yang merasa bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut kurang akurat, walaupun cukup banyak juga yang menganggap sudah baik dan cukup akurat.

2. Relevan

Untuk mendapatkan gambaran tentang indikator Relevan secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.19
Tanggapan Responden tentang Relevan

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jml	Total Skor	Skor Ideal
28	Informasi yang dihasilkan oleh SIKKA/MPN	5	27	2	6	0	40	151	200
		12.5	67.5	5.0	15.0	0.0	100.0	75.5	
29	Tingkat relevansi informasi yang dihasilkan oleh SIKKA/MPN	10	20	3	7	0	40	153	200
		25.0	50.0	7.5	17.5	0.0	100.0	76.5	
Jumlah Skor Total								304	
Persentase								76.00	

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Relevan. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total Relevan adalah 304. Jumlah skor tersebut kemudian pengukurannya ditentukan dengan cara:

Skor ideal = 5 x 2 x 40 = 400

Persentase Skor = [(skor aktual) : Skor ideal] x 100%

= (304 : 400) x 100%

= 76,00%

Dari data di atas menunjukan indikator Relevan yang terdiri dari 2 pernyataan, berada dalam skala kategori baik. Hasil persentase skor tanggapan responden sebesar 76% maka bisa dikatakan relevansi informasi yang dihasilkan system informasi dalam hal ini SIKKA/MPN yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah kanwil Jabar I berada pada level

atau kategori baik. Namun persentase baik untuk indikator ini masih sangat rendah, ini mengindikasikan bahwa dalam kenyataannya masih ada beberapa responden yang menilai bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut masih kurang relevan.

3. Tepat waktu

Untuk mendapatkan gambaran tentang indikator Tepat waktu secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.20
Tanggapan Responden tentang Tepat waktu

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jml	Total Skor	Skor Ideal
30	Informasi yang dibutuhkan dapat di akses dengan	4	21	6	6	3	40	137	200
		10.0	52.5	15.0	15.0	7.5	100.0	68.5	
Jumlah Skor Total								137	
Persentase								68.50	

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Tepat waktu. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total Tepat waktu adalah 137. Jumlah skor tersebut kemudian pengukurannya ditentukan dengan cara:

Skor ideal = 5 x 1 x 40 = 200

Persentase Skor = [(skor aktual) : Skor ideal] x 100%

= (137: 200) x 100%

= 68,50%

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukan secara keseluruhan indikator Tepat waktu yang terdiri dari 1 pernyataan, berada dalam skala kategori baik. Hasil persentase skor tanggapan responden sebesar 68,50%

maka bisa dikatakan ketepatan waktu informasi yang dihasilkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah kanwil Jabar I berada pada level atau kategori baik. Namun persentase baik daripada indikator ini masih sangat rendah, ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaannya masih ada beberapa responden yang merasa bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut kurang tepat waktu. Hal ini tentu dapat menghambat, karena seperti kita ketahui bahwa tepat waktu adalah sebuah komponen penting dalam kualitas informa, sebuah informasi yang berkualitas haruslah tepat waktu, karena apabila tidak tepat waktu akan menghambat dalam proses pengambilan keputusan.

4. Lengkap

Untuk mendapatkan gambaran tentang indikator keengganan untuk berubah secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.21
Tanggapan Responden tentang Lengkap

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Jml	Total Skor	Skor Ideal
31	Informasi yang dihasilkan oleh SIKKA/MPN mempunya beberapa kelemahan salah satunya tidak lengkap	2	11	10	8	9	40	109	200
		5.0	27.5	25.0	20.0	22.5	100.0	54.5	
32	Informasi yang dihasilkan oleh SIKKA/ MPN	3	17	1	16	3	40	121	200
		7.5	42.5	2.5	40.0	7.5	100.0	60.5	
Jumlah Skor Total								230	
Persentase								57.50	

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Lengkap. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total Lengkap adalah 230. Jumlah skor tersebut kemudian pengukurannya ditentukan dengan cara:

Skor ideal = 5 x 2 x 40 = 400

Persentase Skor = [(skor aktual) : Skor ideal] x 100%

= (230: 400) x 100%

= 57,50%

Dari perhitungan di atas menunjukan secara keseluruhan indikator Lengkap yang terdiri dari 2 pernyataan, berada dalam skala kategori cukup baik. Hasil persentase skor tanggapan responden sebesar 57,50% maka bisa dikatakan kelengkapan informasi yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah kanwil Jabar I berada pada level atau kategori cukup. Dari kedua pertanyaan diatas keduanya memiliki persentase yang berada pada level cukup masing-masing sebesar 54,5% dan 60,5%. Ini mengindikasikan bahwa masih terdapat masalah dalam kualitas informasi yang dihasilkan salah satunya kelengkapan daripada informasi tersebut. Ini tentu saj cukup menghambat, karena seperti kita ketahui bahwa kelengkapan sebuah informasi adalah syarat yang sangat penting dalam sebuah informasi yang berkualitas. Karena kalau tidak lengkap maka sebuah informasi bisa menyebabkan multi tafsir dan juga menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak.

- **Variabel Z Kualitas Informasi**

Dari seluruh urayan penjelasan tiap inikator yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan secara keseluruhan untuk variabel Kualitas Informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22
Variabel Z Kualitas Informasi

No	Pernyataan	5	4	3	2	1	Kategori	Total Skor	Skor Ideal
26	Informasi yang dihasilkan oleh SIKKA/MPN	2	30	0	8	0	Baik	146	200
		5.0	75.0	0.0	20.0	0.0		73.0	
27	Tingkat akurasi informasi yang dihasilkan oleh SIKKA/MPN	11	19	1	9	0	Baik	152	200
		27.5	47.5	2.5	22.5	0.0		76.0	
28	Informasi yang dihasilkan oleh SIKKA/MPN	5	27	2	6	0	Baik	151	200
		12.5	67.5	5.0	15.0	0.0		75.5	
29	Tingkat relevansi informasi yang dihasilkan oleh SIKKA/MPN	10	20	3	7	0	Baik	153	200
		25.0	50.0	7.5	17.5	0.0		76.5	
30	Informasi yang dibutuhkan dapat di akses dengan	4	21	6	6	3	Baik	137	200
		10.0	52.5	15.0	15.0	7.5		68.5	
31	Informasi yang dihasilkan oleh SIKKA/MPN mempunya beberapa kelemahan salah satunya tidak lengkap	2	11	10	8	9	Cukup	109	200
		5.0	27.5	25.0	20.0	22.5		54.5	
32	Informasi yang dihasilkan oleh SIKKA/ MPN	3	17	1	16	3	Cukup	121	200
		7.5	42.5	2.5	40.0	7.5		60.5	
Jumlah Skor Total								969	
Persentase								69.21	

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai Variabel Z Kualitas Informasi. Berdasarkan hasil pengolahan yang disajikan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa skor total Variabel Z Kualitas Informasi adalah 969. Jumlah skor tersebut kemudian pengukurannya ditentukan dengan cara:

Skor ideal = 5 x 7 x 40 = 1400

Persentase Skor = [(skor aktual) : Skor ideal] x 100%

= (969 : 1400) x 100%

= 69,21%

Dari hasil perhitungan di atas menunjukan total Variabel Z Kualitas Informasi yang terdiri dari 7 pernyataan, diperoleh hasil akhir sebesar 969, ini artinya Variabel Z Kualitas Informasi berada dalam skala kategori baik. Hasil persentase skor tanggapan responden sebesar 69,21% maka bisa dikatakan Kualitas Informasi yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah kanwil Jabar I berada pada level atau kategori baik. Namun seperti yang kita lihat bahwa persentase baik dari variable ini masih sangat rendah. Dari data diatas dapat terlihat bahwa walaupun kualitas informasi dikategorikan baik, namun masih terdapat beberapa masalah dalam kenyataannya seperti yang dijelaskan di atas.

4.4 Analisis Kuantitatif (Metode Verifikatif)

4.4.1 Analisis Pengaruh Partisipasi Pengguna terhadap Sistem Informasi Akuntansi dan Implikasinya pada Kualitas Informasi (Studi pada KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat)

Pada bagian ini akan diuji pengaruh Partisipasi Pengguna terhadap Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Implikasinya pada Kualitas Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung menggunakan analisis Jalur (*path analysis*). Data yang digunakan dalam analisis jalur pada penelitian ini berdasarkan data 40 responden. Karena skor jawaban responden masih berbentuk skala pengukuran ordinal, maka agar dapat diolah menggunakan analisis jalur terlebih dahulu data ordinal tersebut dikonversi menjadi skala interval melalui *method of succesive interval.*

4.4.1.1 Analisis Jalur

Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kita harus mguji terlebih dahulu keeratan hubungan antar semua variabel termasuk antara kedua variabel independen. Dalam perhitungan kali ini penulis menggunakan Cara perhitungan komputerisasi dengan menggunakan media program komputer yaitu *SPSS 14 for windows*. Berikut adalah hasil pengolahan korelasi atau hubungan antar variabel:

Tabel 4.23
Korelasi Antar Variabel Penelitian

Correlations

		Z	X	Y
Pearson Correlation	Z	1.000	.626	.778
	X	.626	1.000	.560
	Y	.778	.560	1.000
Sig. (1-tailed)	Z	.	.000	.000
	X	.000	.	.000
	Y	.000	.000	.
N	Z	40	40	40
	X	40	40	40
	Y	40	40	40

Sumber : Output Sofware Statistical Program For Social Science (SPSSVersion14.0)

Berdasarkan Nilai koefisien korelasi diatas dapat dilihat bahwa hubungan antara Partisipasi Pengguna(X) dengan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (Y) sebesar 0,560 dan masuk dalam katagori sedang atau Cukup Kuat. Arah hubungan positif antara Partisipasi Pengguna dengan Penerapan sistem informasi akuntansi menunjukan bahwa apabila Partisipasi pengguna makin baik akan diikuti dengan Penerapan Sistem Infomasi Akuntansi yang

makin baik pula. Kemudian Hubungan antara Partisipasi Pengguna (X) dengan Kualitas Informasi (Z) menunjukan sebesar 0.626 dan masuk kedalam katagori cukup tinggi atau kategori kuat, hal ini juga sama seperti hubungan antara Penerapan Informasi Akuntansi dengan Kualitas Informasi yang memiliki hubungan yang kuat pula yaitu sebesar 0.778 dengan hubungan yang positif juga.

Setelah di atas dijelaskan besarnya hubungan antar variable selanjutnya penulis akan menguji Koefisien Korelasi dan kontribusi variabel partisipasi pengguna dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas informasi secara parsial dan simultan, sebagai berikut :

1. Partisipasi Pengguna terhadap Penerapan Sistem informasi Akuntansi. Berikut adalah hasil perhitungan secara komputerisasi yaitu *SPSS 14 for windows* yaitu:

Besarnya Koefisien Korelasi dan kontribusi variabel partisipasi pengguna sistem informasi terhadap penerapan sistem informasi akuntansi dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.24
Koefisien Korelasi Dan Determinasi X ke Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.560[a]	.314	.296	6.77143

a. Predictors: (Constant), X

Sumber : Output Sofware Statistical Program For Social Science (SPSSVersion14.0)

Berdasarkan Tabel di atas, maka hasil koefisien korelasi yang diperoleh adalah 0,560. Hal ini menunjukan keeratan/hubungan yang cukup partisipasi pengguna sistem informasi dengan penerapan sistem informasi akuntansi. Koefisien determinasi yang sebesar 0,314. Nilai ini menunjukkan bahwa secara parsial sebesar 31,4% perubahan-perubahan yang terjadi pada penerapan sistem informasi akuntansi disebabkan oleh partisipasi pengguna sistem informasi. Ini berarti untuk Penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang baik salah satu faktor yang menunjang adalah Partisipasi Pengguna.

2. Partisipasi Pengguna terhadap Kualitas Informasi. Berikut adalah hasil perhitungan secara komputerisasi yaitu *SPSS 14 for windows* yaitu:

Besarnya Koefisien Korelasi dan kontribusi variabel partisipasi pengguna sistem informasi terhadap Kualitas Informasi dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi sebagai berikut

Tabel 4.25
Koefisien Korelasi Dan Determinasi X ke Z

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.626[a]	.392	.376	4.17744

a. Predictors: (Constant), x

b. Dependent Variable: z

Sumber : Output Sofware Statistical Program For Social Science (SPSSVersion14.0)

Berdasarkan Tabel di atas, maka hasil koefisien korelasi yang diperoleh adalah 0,626. Hal ini menunjukan tingkat keeratan/hubungan yang cukup antara partisipasi pengguna sistem informasi dengan kualitas informasi.

Koefisien determinasi yang sebesar 0,392. Nilai ini menunjukkan bahwa secara parsial sebesar 39,2% perubahan-perubahan yang terjadi pada kualitas informasi disebabkan oleh partisipasi pengguna sistem informasi. Ini berarti untuk menghasilkan Informasi yang berkualitas dan dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan, maka Partisipasi pengguna yang baik sangatlah diperlukan.

3. Penerapan Sistem informasi Akuntansi terhadap Kualitas Informasi. Berikut adalah hasil perhitungan secara komputerisasi yaitu *SPSS 14 for windows* yaitu:

Besarnya Koefisien Korelasi dan kontribusi variabel Penerapan Sistem informasi Akuntansi terhadap Kualitas Informasi dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.26
Koefisien Korelasi Dan Determinasi Y ke Z

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.778[a]	.605	.594	3.36927

a. Predictors: (Constant), y

b. Dependent Variable: z

Sumber : Output Sofware Statistical Program For Social Science (SPSSVersion14.0)

Berdasarkan Tabel di atas, maka hasil koefisien korelasi yang diperoleh adalah 0,778. Hal ini menunjukan tingkat keeratan/hubungan yang erat antara partisipasi pengguna sistem informasi dengan kualitas informasi. Koefisien determinasi yang sebesar 0,605. Nilai ini menunjukkan bahwa secara parsial

sebesar 60,5% perubahan-perubahan yang terjadi pada kualitas informasi disebabkan oleh penerapan sistem informasi akuntansi. Ini Berarti Penerapan Sistem Informasi Akuntansi memiliki Peranan Penting dalam menghasilkan Informasi yang berkualitas untuk Pengambilan Keputusan.

4. Partisipasi Pengguna dan Penerapan Sistem informasi Akuntansi terhadap Kualitas Informasi. Berikut adalah hasil perhitungan secara komputerisasi yaitu *SPSS 14 for windows* yaitu:

Besarnya Koefisien Korelasi dan kontribusi variabel partisipasi pengguna dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas informasi secara bersama-sama atau simultan dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4.27

Model summary untuk korelasi X dan Y terhadap Z Pada KPP Pratama Bandung di Wilayah Kanwil Jabar I

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.811[a]	.658	.639	3.17712

a. Predictors: (Constant), Y, X

Sumber : Output Sofware Statistical Program For Social Science (SPSSVersion14.0)

Nilai R (0,811) pada tabel 4.24 menunjukkan kekuatan hubungan kedua variabel independen (Partisipasi Pengguna dan Penerapan Sistem informasi Akuntansi) secara simultan dengan Kualitas Informasi. Jadi diketahui bahwa

secara simultan kedua variabel independen (Partisipasi Pengguna dan Penerapan Sistem informasi Akuntansi) memiliki hubungan yang kuat dengan kualitas Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah Kanwil jabar I.

Nilai korelasi *r* hanya menyatakan erat atau tidaknya hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, digunakan koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang menyatakan besar pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Dari tabel di atas terlihat pula nilai R-Square sebesar 0,658 atau 65,8% ini menunjukkan bahwa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung, variabel Partisipasi Pengguna dan Penerapan Sistem informasi Akuntansi secara simultan mampu menerangkan perubahan yang terjadi pada Kualitas Informasi sebesar 65,8%. Dengan kata lain Partisipasi Pengguna dan Penerapan Sistem informasi Akuntansi secara bersama-sama memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 65,8% terhadap Kualitas Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung. Sementara sisanya sebesar 34,2% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diamati diluar variable yang diteliti. Seperti *process orientation and proper managerial and business knowledge of information specialists* (proses orientasi dan pengetahuan manajerial dan bisnis yang tepat dari spesialis informasi); *a proper culture* (budaya yang tepat); dan *organizational structure and culture, as well as its process orientation*

(struktur organisasi yang sesuai dan budaya serta proses orientasi). (Turk et al; 2006).

4.4.1.2 Pengujian Hipotesis

Stelah diuraikan hubungan antar variable, selanjutnya akan diuji pengaruh antara Partisipasi Pengguna (X) dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (Y) terhadap Kualitas informasi (Z) baik secara parsial atau masing-masing maupun secara simultan atau bersama-sama. Karena analisis yang digunakan adalah analisis jalur maka akan diuji juga pengaruh antara Partisipasi Pengguna (X) terhadap Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (Y) seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengujian Secara Parsial

Pada pengujian koefisien secara parsial akan diuji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 2,024 yang diperoleh dari tabel t pada $\alpha = 0.05$ dan derajat independen 38 untuk pengujian dua pihak.

A. Pengaruh Partisipasi Pengguna terhadap Sistem Informasi Akuntansi di KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat I

Pada bagian ini peneliti akan menguji seberapa besar pengaruh antara Partisipasi Pengguna terhadap Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah Kanwil Jabar I.

Menentukan Uji hipotesis, dengan langkah-langkah :

Untuk menguji koefisien jalur secara parsial antara Partisipasi Pengguna terhadap Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, terlebih dahulu ditentukan rumusan hipotesisnya sebagai berikut:

$H_0 : P_{yx_i} = 0$ Tidak terdapat pengaruh yang nyata dari partisipasi pengguna sistem informasi terhadap penerapan sistem informasi akuntansi

$H_1 : P_{yx_i} \neq 0$ Terdapat pengaruh yang nyata dari partisipasi pengguna sistem informasi terhadap penerapan sistem informasi akuntansi

Kriteria uji:

Tolak Ho jika t hitung > t table ($t_{\alpha;n-k-1}$)

Dalam perhitungan kali ini penulis menggunakan Cara perhitungan komputerisasi dengan menggunakan media program komputer yaitu *SPSS 14 for windows*. Berikut adalah hasil pengolahan untuk mengetahui pengaruh antar variabel Partisipasi Pengguna (X) terhadap Penerapan Sistem informasi Akuntansi (Y):

Tabel 4.28
Koefisien Jalur Pengaruh Partisipasi Pengguna Sistem Informasi Terhadap Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

Coefficients[a]

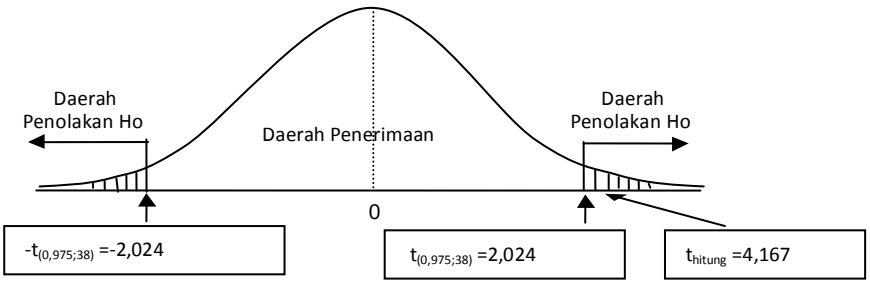
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.440	5.325		4.402	.000
	X	1.295	.311	.560	4.167	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Output Sofware Statistical Program For Social Science (SPSSVersion14.0)

Berdasarkan data keluaran software SPSS seperti disajikan pada tabel 4.25 diperoleh nilai t_{hitung} variabel Partisipasi Pengguna sebesar 4,167. Karena nilai t_{hitung} (4,167) lebih besar dari t_{tabel} (2,024) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga H_1 diterima, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Pengguna berpengaruh terhadap Penerapan Sistem Informasi Akuntansi. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa Partisipasi yang baik akan meningkatkan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah Kanwil Jabar I.

Gambar 4.1
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Parsial X terhadap Y



Berdasarkan hasil perhitungan di atas didapat t_{hitung} = 4,167 > 2,024 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Kriteria pengujian juga dapat menggunakan nilai Sig. pada output SPSS, dimana kriteria pengujiannya adalah Tolak H_0 bila nilai Sig. < 0,05. Dari output SPSS terlihat bahwa Sig. = 0,000 jauh dibawah 0,05 sehingga H_0 ditolak.

Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan adalah Partisipasi pengguna berpengaruh terhadap Penerapan sistem informasi akuntansi pada KPP Pratama Bandung di Wilayah Kanwil Jabar I dengan signifikan, dan searah.

B. Pengaruh Partisipasi Pengguna terhadap Kualitas Informasi di KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat I

Pada bagian ini peneliti akan menguji seberapa besar pengaruh antara Partisipasi Pengguna terhadap Kualitas Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah Kanwil Jabar I.

Menentukan Uji hipotesis, dengan langkah-langkah :

Untuk menguji koefisien jalur secara parsial antara Partisipasi Pengguna terhadap Kualitas Informasi, terlebih dahulu ditentukan rumusan hipotesisnya sebagai berikut:

$H_0 : \rho = 0$ Partisipasi Pengguna tidak berpengaruh terhadap kualitas Informasi.

$H_1 : \rho \neq 0$ Partisipasi Pengguna berpengaruh terhadap kualitas Informasi.

Kriteria uji:

Tolak Ho jika t hitung > t table ($t_{\alpha;n-k-1}$)

Dalam perhitungan kali ini penulis menggunakan Cara perhitungan komputerisasi dengan menggunakan media program komputer yaitu *SPSS 14 for windows*. Berikut adalah hasil pengolahan untuk mengetahui pengaruh antar variabel Partisipasi Pengguna (X) terhadap Kualitas informasi (Z):

Tabel 4.29

Pengujian Koefisien secara parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.628	3.070		-2.484	.018
	X	.422	.176	.278	2.395	.022
	Y	.408	.076	.622	5.357	.000

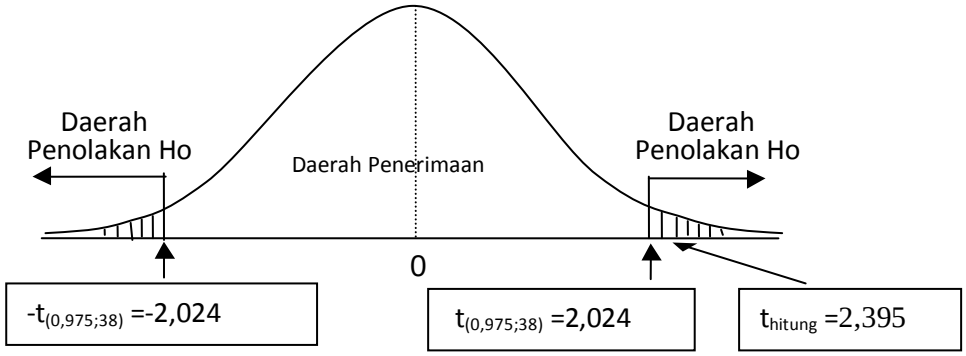
a. Dependent Variable: Z

Sumber : Output Sofware Statistical Program For Social Science (SPSSVersion14.0)

Berdasarkan data keluaran software SPSS seperti disajikan pada tabel 4.26 diperoleh nilai thitung variabel Partisipasi Pengguna sebesar 2,395. Karena nilai thitung (2,395) lebih besar dari ttabel (2,024) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Pengguna berpengaruh terhadap Kualitas Informasi. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa Partisipasi Pengguna sistem yang baik akan meningkatkan Kualitas informasi yang dihasilkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah kanwil jabar I.

Gambar 4.2

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Parsial X terhadap Z



Gambar 4.2 menunjukkan bahwa t_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga dapat disimpulklan bahwa Partisipasi pengguna berpengaruh terhadap Kualitas informasi yang dihasilkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah kanwil jabar I.

C. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Informasi di KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat I

Pada bagian ini peneliti akan menguji seberapa besar pengaruh antara Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah Kanwil Jabar I.

Menentukan Uji hipotesis, dengan langkah-langkah :

Untuk menguji koefisien jalur secara parsial antara Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Informasi, terlebih dahulu ditentukan rumusan hipotesisnya sebagai berikut:

$H_0 : \rho = 0$ Penerapan Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas Informasi.

$H_1 : \rho \neq 0$ Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas Informasi.

Kriteria uji:

Tolak Ho jika t hitung > t table ($t_{\alpha;n-k-1}$)

Dalam perhitungan kali ini penulis menggunakan Cara perhitungan komputerisasi dengan menggunakan media program komputer yaitu *SPSS 14 for windows*. Berikut adalah hasil pengolahan untuk mengetahui pengaruh antar variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (Y) terhadap Kualitas informasi (Z):

Tabel 4.30

Pengujian Koefisien secara parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.628	3.070		-2.484	.018
	X	.422	.176	.278	2.395	.022
	Y	.408	.076	.622	5.357	.000

a. Dependent Variable: Z

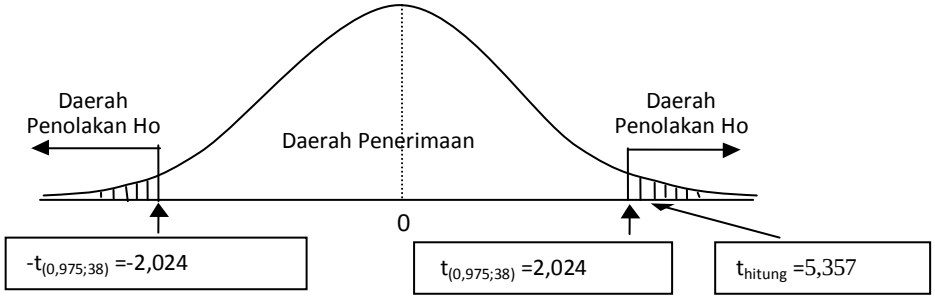
Sumber : Output Sofware Statistical Program For Social Science (SPSSVersion14.0)

Berdasarkan data keluaran software SPSS seperti disajikan pada tabel 4.26 diperoleh nilai thitung variabel Penerapan Sistem Informasi Akuntansi sebesar 5,375. Karena nilai thitung (5,375) lebih besar dari ttabel (2,024) maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima, artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Informasi. Hasil pengujian ini memberikan bukti empiris bahwa Penerapan

Sistem Informasi Akuntansi yang baik akan meningkatkan Kualitas informasi yang dihasilkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah kanwil jabar I.

Gambar 4.3

Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Parsial Y terhadap Z



Gambar 4.3 menunjukkan bahwa t_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga dapat disimpulklan bahwa Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas informasi yang dihasilkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah kanwil jabar I.

2. Pengaruh Partisipasi Pengguna Sistem Informasi dan Sistem Informasi Akuntansi Direktorat Jenderal Pajak terhadap Kualitas Informasi di KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat I (secara Simultan atau bersama-sama)

Pengujian secara simultan bertujuan untuk membuktikan apakah Partisipasi Pengguna dan Penerapan Sistem Informasi Akuntasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat I dengan rumusan hipotesis statistik sebagai berikut:

Hipotesis penelitian tersebut dinyatakan dalam hipotesis statistik berikut ini:

H_0 : $P_{zx} = P_{zy} = 0$ (Secara simultan Partisipasi Pengguna dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas Informasi)

H_1 : Sekurang-kurangnya ada satu $P_{zxy} \neq 0$, i = 1, 2 (Secara simultan Partisipasi Pengguna dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas Informasi).

Kriteria uji, tolak Ho jika F hitung > F_{α} (k_in-k-1), dengan F_{α} (k_in-k-1) diperoleh dari tabel distribusi F dengan α = 5 % dan derajat bebas db_1 = k, dan db_2 = n-k-1

Tabel 4.31
Pengujian Koefisien secara simultan (Uji F)

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	717.673	2	358.837	35.549	.000[a]
	Residual	373.482	37	10.094		
	Total	1091.155	39			

a. Predictors: (Constant), Y, X

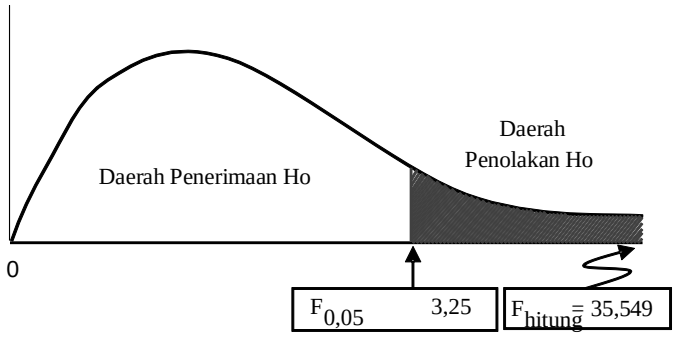
b. Dependent Variable: Z

Sumber : Output Sofware Statistical Program For Social Science (SPSSVersion14.0)

Pada table di atas dapat kita ketahui bahwa hasil pengujian signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung (35,549) > F tabel (3,25), maka pada tingkat kekeliruan 5% (α=0.05) diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha. Artinya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Pengguna dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi secara simultan

(bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kualitas Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat I.

Gambar 4.4
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji Simultan

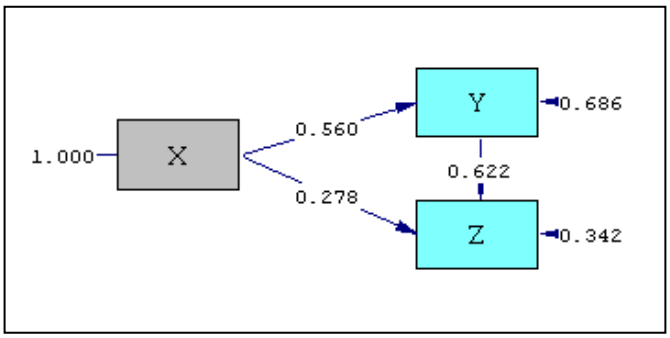


Gambar 4.4 menunjukkan bahwa F_{hitung} jatuh pada daerah penolakan Ho, sehingga dapat disimpulklan bahwa Partisipasi Pengguna dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap kualitas Informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat I.

3. Besar Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Dari keseluruhan hasil Pengolahan data di atas. Maka didapatkan diagram jalur Partisipasi Pengguna Sistem Informasi dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Direktorat Jenderal Pajak terhadap Kualitas Informasi di KPP Pratama Bandung di wilayah Kanwil Jawa Barat I sebagai berikut:

Gambar 4.5
Diagram Jalur



Berdasarkan diagram jalur di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Pengaruh langsung partisipasi pengguna (X) terhadap penerapan sistem informasi akuntansi (Y) sebesar $(0,560)^2$ x 100% = 31,4%.
- Pengaruh langsung partisipasi pengguna (X) terhadap kualitas informasi (Z) adalah sebesar $(0,626)^2$ x 100% = 39,2%.
- Pengaruh langsung penerapan sistem informasi akuntansi (Y) terhadap kualitas informasi (Z) adalah sebesar $(0,778)^2$ x 100% = 60,5%.
- Pengaruh tidak langsung partisipasi pengguna (X) terhadap kualitas informasi (Z) melalui penerapan sistem informasi akuntansi (Y) adalah 0,560 x 0,622 x 100% = 34,8%.